

# KAJIAN AKSESIBILITAS UMKM DAN IKM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN DI KOTA SEMARANG

Margunani\*, Avi Budi Setiawan, Nurjannah Rahayu Kistanti

Universitas Negeri Semarang

Gedung L, FE UNNES Kampus Sekaran Gunungpati Kota Semarang 50229

## Jurnal Riptek

Volume 13 No. 2 (147 – 157)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

## Info Artikel:

Diterima: 22 September 2019

Direvisi: 20 Oktober 2019

Disetujui: 23 November 2019

Tersedia online: 20 Desember 2019

## Kata Kunci:

Aksesibilitas kredit, UMKM IKM, Kota Semarang, Lembaga Keuangan

## Korespondensi penulis:

\*[margunani@mail.unnes.ac.id](mailto:margunani@mail.unnes.ac.id)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui preferensi UMKM dan IKM Kota Semarang terhadap aksesibilitas pembiayaan lembaga keuangan, untuk mengetahui besaran penyaluran pembiayaan UMKM IKM, untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab rendahnya aksesibilitas, dan untuk memberikan strategi peningkatan kemampuan UMKM dan IKM terhadap aksesibilitas lembaga keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan responden pelaku usaha UMKM dan IKM (berjumlah 100 responden) serta perwakilan lembaga keuangan, dan OJK. Analisis yang digunakan adalah mixed method dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan 66% pelaku UMKM IKM mengalami kesulitan dalam mencari pinjaman modal di lembaga keuangan. Penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR) di Kota Semarang dengan nilai akad Rp. 621.959.783.457. Mayoritas pelaku UMKM IKM di Kota Semarang meminjam di Lembaga keuangan bank dibandingkan Lembaga keuangan non bank. Jumlah dana yang disalurkan oleh Lembaga keuangan kepada UMKM di Kota Semarang sebesar Rp 22.774.663.687.032, sedangkan Lembaga keuangan non bank Rp 104.836.360.801. Untuk kredit WIBAWA yang disalurkan Rp 3.024.000.000. Faktor penyebab rendahnya tingkat aksesibilitas usaha kecil mikro terhadap kredit adalah tingginya tingkat suku bunga, aspek legalitas, tidak memiliki tambahan agunan, pengusaha tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit, dan rendahnya kemampuan dalam pembukuan yang profesional. Adapun strategi yang digunakan adalah mengkombinasikan hasil SWOT yaitu Pelatihan dan Pendampingan UMKM dan IKM dalam pembuatan laporan keuangan, sosialisasi dan pendampingan untuk membuat IUMK dan NPWP, Pengenalan UMKM kepada sumber pembiayaan (Bank dan Non Bank), memberi pelatihan perhitungan kredit yang tepat dan sesuai berdasarkan kebutuhan pengembangan UMKM dan IKM.

Cara mengutip:

Margunani, M., Setiawan, AB., Kristanti, NR. 2019. Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap Lembaga Keuangan Di Kota Semarang. **Jurnal Riptek**. Vol. 13 (2) 147-157.

## PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM memiliki kontribusi secara sosial dan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi, sehingga mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan wilayah pedesaan maupun perkotaan (Fatoki dan Asah, 2011). Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara maju merupakan akselerator tenaga kerja, inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Mura, 2012). Sedangkan di negara-negara berkembang, sektor UMKM telah mengkaryakan lebih dari 22% dari total tenaga kerja produktif (Kayanula, et al., 2000). Dengan adanya UMKM maka dapat mengatasi permasalahan pengangguran, karena dengan berdirinya suatu UMKM dapat menyerap tenaga kerja.

UMKM memiliki banyak permasalahan klasik yang seringkali menjadi faktor penghambat perkembangannya, antara lain minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya penguasaan teknologi, kurangnya informasi mengenai akses permodalan, pemasaran dan peningkatan kapabilitas. Faktor permodalan adalah bagian terpenting dalam operasional aktivitas bisnis, karena tanpa kemudahan akses permodalan justru akan mengakibatkan kerentanan terhadap keberlangsungan dan penumbuhan potensi usaha (Rahaman, 2011). Rahaman juga menyatakan bahwa usaha skala kecil dan menengah tidak pernah mudah memperoleh bantuan modal dan jasa perbankan lainnya dengan tingkat bunga dan persyaratan yang terjangkau. Aksesibilitas keuangan baik dari sumber formal maupun informal akan mengurangi permasalahan hambatan kredit yang akan digunakan untuk investasi awal maupun pengembangan usaha (Beck, et.al., 2015). Rendahnya aksesibilitas

usaha kecil mikro terhadap akses kredit bank, menyebabkan banyaknya pengusaha kecil mikro memanfaatkan lembaga keuangan informal sebagai sumber pembiayaan.

Dari uraian permasalahan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa saat ini sangat diperlukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan identifikasi masalah aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap pembiayaan lembaga keuangan dan solusi penyelesaiannya. Untuk itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut : Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui preferensi UMKM dan IKM Kota Semarang terhadap aksesibilitas pembiayaan lembaga keuangan, untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan lembaga keuangan untuk UMKM dan IKM Kota Semarang yang mengajukan kredit, untuk mengetahui besaran penyaluran pembiayaan UMKM IKM oleh lembaga keuangan di Kota Semarang dalam kurun waktu minimal 3 tahun terakhir, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap pembiayaan lembaga keuangan di Kota Semarang, dan untuk memberikan solusi atau strategi peningkatan kemampuan UMKM dan IKM terhadap aksesibilitas lembaga keuangan.

## METODE ANALISA

Objek penelitian ini adalah Kota Semarang dengan memfokuskan pada UMKM dan IKM yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara data sekunder dan data primer. Data primer yaitu dengan menyebar kuisioner kepada UMKM dan IKM Kota Semarang yaitu berjumlah 100 pelaku usaha. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yaitu BPS Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Dinas Perindustrian Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta instansi yang terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion (FGD)* dan disempurnakan dengan menggunakan *depth interview*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Mix Method (Analisis kuantitatif dan kualitatif) dan Analisis SWOT untuk menyusun strategi aksesibilitas kredit UMKM dan IKM di Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha yang jenis usahanya adalah UMKM

dan IKM, di Wilayah Kota Semarang. Rata-rata usia pengusaha tersebut adalah diatas 20 tahun, dan di bawah 65 tahun. Usia usaha dari UMKM dan IKM itu sendiri juga bervariasi, menurut survey usia usaha yang paling lama yaitu 30 tahun, dan usia yang paling baru di dirikan yaitu 2 bulan. Usia usaha tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap aktivitas usaha yang dijalankan dari masing-masing pelaku UMKM dan IKM, yang mana semakin lama usia suatu usaha, mengindikasikan bahwa usaha tersebut dapat menjalankan aktivitas usaha dengan semakin baik, dan juga sudah dapat mengenal pasar dengan baik.

**Tabel 1. Jenis Kebutuhan Bantuan Usaha yang Dibutuhkan oleh Para Pelaku IKM dan UMKM di Kota Semarang**

No	Jenis Usaha	Kebutuhan Usaha
1	Konsumsi	Bantuan dalam akses pemasaran, bantuan fasilitas dan kemudahan izin usaha, kemudahan akses modal usaha
2	Produksi	Bantuan peralatan produksi, kemudahan dalam akses bahan baku, kemudahan dalam akses modal usaha
3	Jasa	Bantuan promosi dan pemasaran, fasilitas dan peralatan usaha, kemudahan akses modal
4	Lainnya	Bantuan izin usaha, bantuan promosi dan pemasaran, pelatihan manajemen usaha, bantuan modal usaha

Sumber: Data primer diolah, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari semua jenis usaha yang ada di Kota Semarang, kebutuhan usaha yang mereka butuhkan memang berbeda-beda namun relatif sama. Dari semua pelaku jenis usaha tersebut mengatakan bahwa bantuan kebutuhan usaha yang paling mereka butuhkan adalah kemudahan akses modal usaha. Selama ini modal usaha yang mereka butuhkan sulit diakses karena terkendala oleh persyaratan yang mereka anggap begitu sulit dan rumit untuk dapat dipenuhi sehingga akses modal usaha mereka tidak mudah. Dalam menjalankan suatu usaha, modal adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan usaha tersebut. Oleh karena itu, kemudahan akses usaha bagi para pelaku usaha baik IKM maupun UMKM di Kota Semarang harus diperhatikan agar usaha tersebut dapat semakin berkembang dan maju.

Keberadaan Lembaga keuangan memang sangat membantu para pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang memiliki akses modal yang rendah. Mayoritas pelaku UMKM di Kota Semarang memang menggantungkan kebutuhan modalnya pada lembaga keuangan. Alasan mereka meminjam modal di Lembaga keuangan adalah karena kebutuhan modal yang mendesak. Setiap usaha memang memerlukan modal

yang cukup agar usahanya tetap bertahan. Jika usahanya ingin berkembang maka harus ada modal tambahan untuk mengembangkan usaha tersebut. Pinjaman modal yang terkadang sulit diperoleh menjadi alasan mereka untuk meminjam modal di Lembaga keuangan terutama di perbankan. Selain alasan untuk tambahan modal, ada juga pelaku UMKM yang mengatakan bahwa meminjam modal di lembaga keuangan terutama perbankan memiliki resiko dan juga bunga yang tidak terlalu besar seperti meminjam modal di rentenir atau di lembaga lainnya. Selain itu, ada juga pelaku UMKM yang mengatakan bahwa meminjam modal di lembaga keuangan memiliki proses yang lebih mudah khususnya di perbankan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kredit yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM sehingga prosesnya lebih mudah daripada kredit lainnya. Pada umumnya, meminjam modal di Lembaga keuangan memang membutuhkan beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM, namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti bagi mereka untuk meminjam modal di lembaga keuangan. Jika dilihat dari jumlahnya, ada banyak lembaga keuangan perbankan yang tersebar di Kota Semarang baik itu berjenis bank umum maupun bank lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis UMKM dan IKM yang masih berskala mikro dan kecil lebih tepat untuk mengakses kredit di Bank Umum atau BPR. Seperti telah dijelaskan di atas alasan pelaku UMKM dan IKM memilih LKB adalah tingkat bunga yang lebih rendah dan keamanan kreditnya.

Adapun jenis kredit yang lebih sesuai bagi pelaku UMKM dan IKM yang berskala mikro dan kecil adalah jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Wibawa yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Alasan pemilihan KUR adalah tingkat bunga yang rendah, serta mudahnya akses dari pelaku usaha jika ingin mengakses kredit. Selain itu, baik pelaku UMKM maupun pelaku industri kecil tidak mengalami perbedaan dalam mengakses kredit (lihat Tabel 2).

Pengecualian hanya diberikan kepada pelaku kredit dari usaha pertanian atau peternakan yang bersifat budidaya. Meskipun tetap dapat mengakses kredit namun karena sifat usaha yang digeluti tidak menghasilkan keuntungan bulanan maka perlu perlakuan khusus berupa skim tersendiri.

**Tabel 2. Preferensi Pelaku UMKM dan IKM Terhadap Pilihan Lembaga Keuangan**

Jenis Usaha	Size Usaha	Lembaga keuangan yang sesuai	Jenis kredit
UMKM	Mikro, kecil	Bank Umum, BPR	KUR, Kredit Wibawa, kredit tanpa agunan
	Menengah	Bank Umum, Bank Umum Syariah	KUR, Kredit rekening koran
IKM	Mikro kecil	Bank Umum, BPR	KUR, Kredit Wibawa, Kredit tanpa agunan
	Menengah	Bank Umum, Bank Umum syariah	KUR, Kredit rekening koran

Sumber: Data primer diolah, 2019

Selain itu, skim kredit wibawa dan KUR pada nominal tertentu memungkinkan nasabah tidak perlu menggunakan agunan. Skim ini dianggap cocok bagi pelaku usaha mikro dan kecil baik itu industri maupun perdagangan, pertanian dan jenis yang lain. Kredit Wibawa yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dianggap oleh Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil lebih mudah dalam mengakses modal. Kredit Wibawa dengan batas nominal kredit yang diakses sebesar Lima Juta Rupiah dimana syarat lebih mudah yaitu jangka waktu 2 tahun dan pengusaha dapat membayar angsuran tiap bulannya atau tidak yang penting 2 tahun lunas. Selain itu dengan modal yang diberi 5 juta rupiah, mereka tidak harus memberikan tambahan agunan asalkan prosedur persyaratan seperti ijin usaha (Ijuzmelon dan proposal usaha) terpenuhi.

Adapun untuk usaha menengah dan industri menengah dapat menikmati skim kredit yang lebih banyak. Pelaku usaha dapat mengakses kredit rekening koran dimana nominal kredit yang dapat diambil bersifat dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Tingkat bunga yang ditawarkan juga lebih kompetitif. Tetapi usaha yang berskala menengah baiknya diarahkan untuk mengakses pinjaman ke bank Umum maupun bank Syariah. Pertimbangannya adalah jenis kredit rekening koran lebih tepat diarahkan ke pelaku tadi, nominal kredit yang diberikan bisa lebih besar, pengawasan bank menjadi lebih mudah dan tidak ada pembatasan nominal kredit. Adapun jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Umum yaitu kredit modal usaha dan kredit investasi. Kredit modal usaha memang ditujukan kepada pelaku industri menengah dan usaha menengah untuk menambah modal usaha. Sedangkan untuk kredit investasi ditujukan kepada kepada pelaku industri menengah dan usaha menengah untuk membeli peralatan produksi yang jangka panjang yang sifatnya untuk investasi seperti mesin, pendirian pabrik. Kredit ini dapat diakses oleh pelaku

dengan skala usaha menengah hingga besar dan memudahkan pelaku usaha apabila ingin melakukan ekspansi usaha.

Jenis pinjaman yang mayoritas diakses oleh para pelaku UMKM adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Mereka mengatakan bahwa jenis kredit tersebut memiliki bunga yang tidak terlalu tinggi dan agunan yang diajukan hanyalah objek usaha yang dijalankan. Jenis KUR yang biasanya diakses terutama untuk pelaku usaha skala kecil adalah KUR Mikro KUR Kecil. Jenis kredit itu sendiri dibagi lagi kedalam dua jenis yaitu KUR untuk modal kerja dan KUR untuk investasi. Ada sebanyak 75% pelaku usaha yang memilih menggunakan KUR baik kredit modal kerja ataupun kredit investasi. Umumnya mereka memilih jenis kredit ini karena persyaratannya tidak begitu menyulitkan. Namun, untuk jenis kredit ini, jangka waktu yang diberikan tidak lama yaitu hanya 3 sampai 5 tahun saja. Selain itu, ada juga beberapa pelaku usaha yang menggunakan jenis kredit selain KUR seperti, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Rekening Koran (KRK) dan lainnya. Preferensi antara pelaku UMKM dan IKM terhadap jenis kredit yang mereka minati memiliki perbedaan (lihat Tabel 3).

**Tabel 3. Preferensi Pelaku Usaha Terhadap Jenis Kredit**

No	Preferensi Pelaku IKM	Preferensi Pelaku UMKM
1	Bunga kredit yang rendah	Agunan pinjaman ringan
2	Jangka waktu kredit yang lama	Persyaratan kredit yang mudah
3	Proses pencairan kredit yang mudah dan cepat	Frekuensi angsuran yang longgar
4	Limit kredit yang tidak terbatas	Cicilan pembayaran yang ringan
5	Lebih cenderung pada KTA (Kredit Tanpa Agunan)	Lebih cenderung pada KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa preferensi pelaku IKM dan UMKM terhadap jenis kredit pinjaman sangat bervariasi. Para pelaku IKM cenderung memilih jenis kredit KTA karena dianggap jangka waktu kredit yang lebih lama dan limit kredit yang tidak terbatas. Sedangkan para pelaku UMKM lebih cenderung memilih KUR karena dianggap persyaratan yang lebih mudah dan cicilan pembayaran yang lebih ringan.

Jika dilihat dari sisi pelayanan, para pelaku usaha yang pernah meminjam modal di lembaga keuangan mayoritas menilai bahwa pelayanan kredit yang diberikan masih belum maksimal. Dari 100 responden,

ada sebanyak 56% yang merasa pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan masih belum maksimal. Pelayanan yang diberikan masih dirasa membingungkan bagi para pelaku usaha terutama dalam prosedur peminjaman modal. Mereka merasa bahwa prosedur yang harus mereka lalui untuk memperoleh kredit terlalu rumit dan berbelit. Kemudian jika mereka ingin memperoleh pinjaman modal, biasanya pencairan dana pinjaman tersebut cenderung lama. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa besaran pinjaman yang mereka ajukan tidak sesuai dengan yang mereka terima dengan dalih bahwa usaha mereka belum layak untuk memperoleh pinjaman modal dalam jumlah yang besar.

Untuk itu maka berdasarkan data survey, didalam pengembangan usaha, para pelaku usaha di Kota Semarang mayoritas melibatkan bank untuk proses pembangunan atau pengembangan usahanya. Mengingat untuk meminjam ke lembaga keuangan adalah cara yang tepat di lakukan. Bagi sebagian besar pelaku usaha, bank adalah lembaga yang efektif untuk dapat meningkatkan volume usahanya, terlebih bagi pelaku UMKM dan IKM, saat ini banyak bank-bank yang menawarkan program kredit yang menggiurkan, walaupun banyak juga pelaku UMKM dan IKM yang akhirnya mengeluhkan jika kredit ternyata tidak sebaik yang di tawarkan, karena permasalahan-permasalahan yang akhirnya dirasakan, seperti kesulitan dalam mengangsur, persyaratan yang rumit, kurangnya sosialisasi dan sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa program kredit tidak hanya bisa di dapatkan melalui bank umum saja, akan tetapi bisa melalui lembaga keuangan lainnya, seperti Koperasi, Bank Perkreditasi Rakyat dan sebagainya. Namun, memang yang paling dikenal di kalangan pengusaha UMKM dan IKM adalah kredit melalui bank umum, maka sebagian besar, pengusaha-pengusaha tersebut melakukan kredit ke bank-bank umum di Kota Semarang, walaupun memang ada beberapa pengusaha yang melakukan kredit ke koperasi, namun tetap di dominasi pada bank umum. Alasan pengusaha tersebut memilih bank umum untuk melakukan kredit adalah karena memang yang mereka ketahui, bahwa kredit hanya bisa dilakukan melalui bank umum yang saat ini banyak berdiri di Kota Semarang, bahkan di setiap kecamatan sudah dapat di pastikan berdiri bank umum, sehingga aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap bank umum tersebut semakin mudah, sedangkan lembaga keuangan lainnya, masih kurang dapat di kenal oleh masyarakat, dan tidak semua kecamatan berdiri lembaga keuangan seperti koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk nominal kredit yang di pinjam oleh pelaku usaha ke lembaga keuangan adalah Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 450.000.000, dalam nominal peminjaman tersebut tergantung pada kepercayaan lembaga keuangan tersebut dengan pelaku usaha. Untuk pelaku usaha yang baru pertama kali meminjam uang ke lembaga keuangan biasanya nominal yang diberikan masih kecil, yaitu berkisar antara Rp 5.000.000 - Rp10.000.000. Biasanya pelaku usaha yang baru awal meminjam kredit di lembaga keuangan adalah mereka yang baru akan mendirikan usahanya, yang mana pinjaman kredit tersebut digunakan untuk modal awal usaha, maupun hanya untuk tambahan modal, karena banyak juga pengusaha yang sebetulnya sudah memiliki modal, namun karena di rasa modal sendiri tersebut masih kurang, maka melakukan pinjaman kredit ke lembaga keuangan.

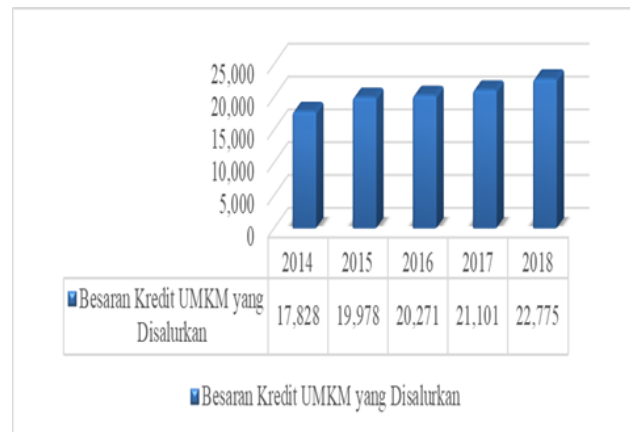
Sedangkan bagi pengusaha-pengusaha yang sudah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan bisa meminjam lebih dari Rp 100.000.000, usaha-usaha ini terbilang menengah, dan sudah berkembang pesat dari awal pendiriannya, omset usahanya juga sudah tinggi dan umur usahanya juga sudah lama, serta sudah melakukan pinjaman kredit berkali-kali ke lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan sudah percaya kepada usaha tersebut dan bersedia memberikan kredit dalam nominal yang tinggi.

**Tabel 4. Nilai Akad, Out standing dan Jumlah Debitur KUR di Kota Semarang**

Tahun	Nilai Akad	Outstanding	Jumlah Debitur
2016	542.549.624.810	94.635.243.444	22.269
2017	453.326.053.842	169.431.190.681	17.302
2018	621.959.783.457	403.771.370.591	18.801

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dalam beberapa tahun terakhir penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Semarang terbilang sedang hal ini apabila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Secara total terdapat 18.801 debitur KUR di Kota Semarang. Adapun nilai akad mencapai Rp. 621.959.783.457. Pada tahun 2018, Kabupaten Kota yang mencatatkan KUR lebih tinggi dari Kota Semarang dari sisi nilai akad dan jumlah debitur adalah; Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.



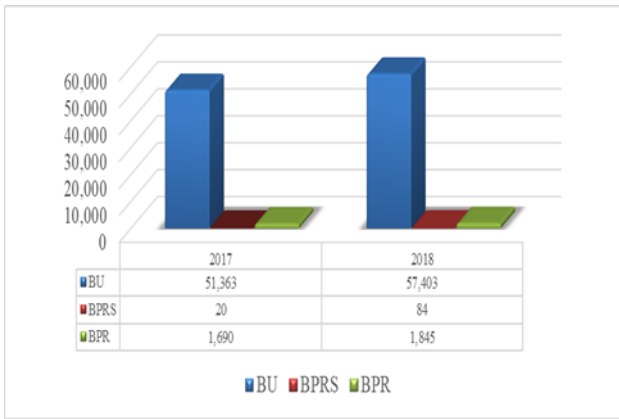
**Gambar 1. Pemberian Pinjaman/ Kredit Perbankan Kepada UMKM di Kota Semarang Tahun 2014-2018 (Dalam Milyar Rupiah)**

Sumber: OJK Provinsi Jawa Tengah, 2019

Sedangkan berdasarkan data yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah debitur UMKM yang meminjam uang di Lembaga keuangan dari tahun 2016- 2019 jika dilihat dari jumlah rekening debitur mempunyai tren menurun sedangkan dari segi nominal yang dipinjam mengalami kenaikan meskipun sedikit mengalami penurunan tahun 2019 ( data hingga April 2019) dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah dana yang disalurkan oleh Lembaga keuangan kepada UMKM di Kota Semarang dari pada tahun 2018 sebesar Rp 22.774.663.687.032, sedangkan Lembaga keuangan non bank menyalurkan Rp 104.836.360.801. Melihat data ini, kecenderungan pelaku UMKM meminjam dana di lembaga keuangan bank di Kota Semarang. Jika dilihat lebih rinci lagi, besaran Kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan selama lima tahun terakhir sebelum tahun 2019 cenderung mengalami kenaikan.

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa perkembangan besaran kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada UMKM di Kota Semarang selama periode 2014-2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, besaran kredit yang disalurkan kepada UMKM adalah sebesar Rp 17.828 Milyar. Kemudian tahun selanjutnya terus meningkat sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 22.775 Milyar.

Peningkatan besaran kredit yang disalurkan tersebut menggambarkan bahwa ketertarikan para pelaku UMKM untuk meminjam kredit di lembaga keuangan semakin tinggi. Kemudian jika dilihat besaran penyaluran kredit dari jenis bank yang menyalurkan, maka besaran kredit yang disalurkan oleh bank umum lebih dominan daripada perbankan lainnya.



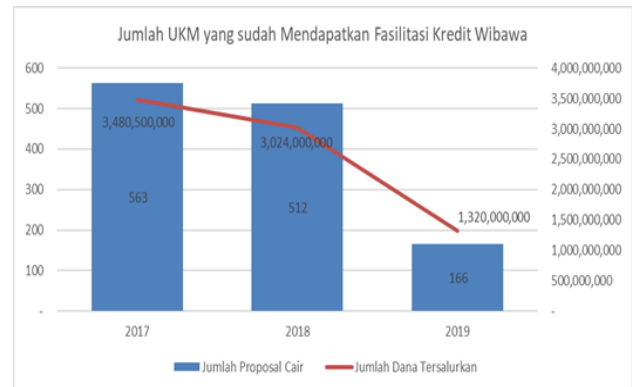
**Gambar 2. Data Bank yang Memberikan Pelayanan Beserta Besarannya Kepada Dunia Usaha di Kota Semarang Tahun 2017-2018 (Dalam Milyar Rupiah)**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY

Gambar 2 menunjukkan bahwa jenis perbankan yang menyalurkan kepada UMKM di Kota Semarang pada tahun 2017-2018 adalah Bank Umum (BU). Bahkan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum kepada UMKM pada tahun tersebut jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, besaran kredit yang disalurkan oleh bank umum adalah sebesar Rp 51.363 Milyar kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp 57.403 Milyar. Jika dibandingkan besaran kredit yang disalurkan oleh perbankan dengan lembaga keuangan non bank, maka besaran kredit yang disalurkan masih didominasi oleh perbankan (lihat Tabel 5).

Pemerintah Kota Semarang juga turut fokus dalam pengembangan UMKM dan IKM yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memberikan fasilitas meluncurkan program kredit WIBAWA.

Kredit WIBAWA adalah program pemberian pinjaman dari pemerintah Kota Semarang kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dengan bunga sangat ringan sebesar 3% per tahun, bekerjasama dengan bank yang ditunjuk Walikota dalam rangka memperkuat permodalan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro lainnya (lihat Gambar 3).



**Gambar 3. Jumlah UKM yang Sudah Mendapatkan Fasilitas Kredit Wibawa Tahun 2017-Juni 2019**

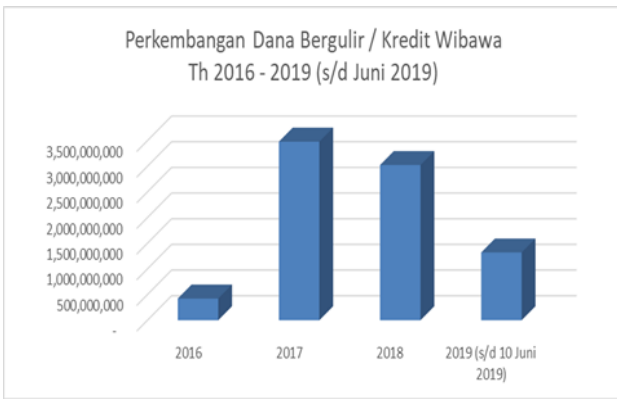
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2019

Realisasinya jumlah UKM yang sudah mendapatkan fasilitas kredit WIBAWA dari tahun 2017 yaitu sebanyak 563 proposal cair dengan besaran nominal yang disalurkan sebesar Rp 3.480.500.000. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dimana jumlah proposal yang cair sebanyak 512 dengan nominal Rp 3.024.000.000. Untuk tahun 2019 per bulan Juni 2019 yaitu sebanyak 166 proposal cair dengan nominal yang disalurkan sebesar Rp 1.320.000.000.

**Tabel 5. Jumlah Debitur dan Rupiah Kredit yang Disalurkan Kepada UMKM di Kota Semarang**

Tahun	Bulan	Lembaga Keuangan Bank		Lembaga Keuangan Non Bank	
		Rek Debitur		Rek Debitur	
		UMKM	Debitur UMKM	UMKM	Debitur UMKM
2016	12	149.911	20.270.652.235.227	Not Available	35.179.994.680
2017	12	138.680	21.101.486.915.593	Not Available	64.073.554.687
2018	12	134.381	22.774.663.687.032	Not Available	104.846.360.801
2019	4	134.326	22.036.028.717.575	Not Available	Data belum tersedia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY



**Gambar 4. Jumlah UKM yang Mengajukan Fasilitas Kredit Wibawa Tahun 2017-Juni 2019**

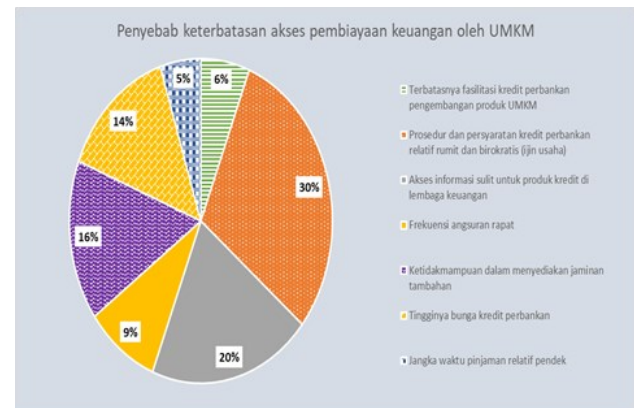
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2019

Pada Gambar 4 terlihat bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan dana bergulir yang disalurkan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan jumlah terbesar dana bergulir atau kredit wibawa yang disalurkan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 3.480.500.000 turun menjadi Rp 3.024.000.000 pada tahun 2018.

Para pelaku UMKM dan IKM di Kota Semarang banyak yang mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam mengakses modal di lembaga keuangan karena persyaratan yang sulit untuk dipenuhi dan prosedur peminjaman yang rumit. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengeluhkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sangat sulit dan membebani terutama persyaratan kelayakan usaha. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit usaha yang mereka jalankan belum berkembang dan terkadang mengalami pasang surut. Selain itu, ada juga persyaratan tentang perizinan usaha yang harus dipenuhi sedangkan usaha yang mereka jalankan juga banyak yang belum memiliki izin usaha. Jika dilihat dari sisi bunga pinjaman, walaupun bunga pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap kredit usaha cenderung tidak terlalu tinggi, namun tidak sedikit pelaku usaha yang merasa bunga yang diberikan masih tergolong tinggi. Mereka khawatir tidak dapat memenuhi angsuran pinjaman yang mereka peroleh karena usaha mereka tidak menentu dan mengalami pasang surut. Oleh karena itu, banyak pelaku UMKM dan IKM yang masih ragu-ragu untuk meminjam modal di lembaga keuangan.

Jika dirinci lebih dalam lagi, maka penyebab rendahnya aksesibilitas antara UMKM dan IKM terhadap lembaga keuangan memiliki kecenderungan yang berbeda. Para pelaku UMKM menganggap bahwa penyebab yang paling dominan dari rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM adalah

dikarenakan frekuensi pembayaran angsuran yang terlalu rapat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 5. Presentase Penyebab Rendahnya Aksesibilitas UMKM terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang**

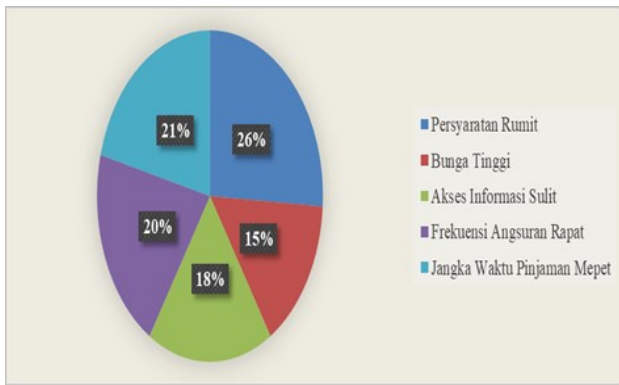
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan Gambar 5 beberapa kendala penyebab keterbatasan akses pembiayaan. Mayoritas penyebab sulitnya akses kredit sebesar 30% adalah prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis. Untuk syarat yang harus dipenuhi UMKM dalam pengajuan kredit harus melampirkan beberapa persyaratan seperti SIUP, NPWP, Laporan keuangan, mutasi rekening, bukti setor pajak UMKM.

Kendala yang kedua, 20% disebabkan Mayoritas para pelaku UMKM di Kota Semarang mengatakan bahwa mereka sulit untuk memperoleh informasi tentang kredit usaha karena jarang ada sosialisasi dari pihak lembaga keuangan. Kalaupun ada, terkadang yang diberikan sosialisasi hanyalah usaha dalam skala yang besar saja. Pihak lembaga keuangan seharusnya juga harus mulai memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha menengah kebawah untuk dapat merasakan mudahnya memperoleh pinjaman modal usaha.

Kemudian yang menjadi kendala ketiga yaitu sebesar 16% pelaku UMKM merasa tidak mampu dalam menyediakan jaminan tambahan. Modal UMKM yang relatif kecil dan berupaya meambah modal, namun asset yang dimiliki oleh UMKM tersebut masih terbatas dan kecil. Untuk mengcover tambahan modal maka diperlukan jaminan yang lebih besar lagi sesuai dengan nominal kedit yang diajukan. Terkadang dalam hal ini, pemilik usaha merelakan aset pribadinya untuk dijadikan jaminan kredit.





**Gambar 6. Presentase Penyebab Rendahnya Aksesibilitas IKM Terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang**

Berbeda halnya dengan para pelaku UMKM, para pelaku IKM lebih menganggap bahwa persyaratan kredit yang rumit membuat mereka enggan untuk mengakses kredit di lembaga keuangan. Gambar 6 menunjukkan bahwa para pelaku IKM di Kota Semarang mayoritas menganggap bahwa persyaratan

kredit yang terlalu rumit menjadi alasan utama rendahnya aksesibilitas mereka terhadap lembaga keuangan. Kebanyakan pelaku IKM mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin memperoleh kredit menyulitkan mereka. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa ada persyaratan yang tidak mereka ketahui bagaimana memenuhinya terutama dalam hal pemberkasan seperti surat izin usaha, NPWP, laporan keuangan rutin, dan lain sebagainya. Dari 100 responden pelaku IKM, sebanyak 26% mengatakan bahwa persyaratan kredit yang terlalu rumit membuat mereka berpikir dua kali jika ingin mengakses kredit di lembaga keuangan.

Perumusan strategi dalam aksesibilitas kredit UMKM dan IKM yaitu dengan menggunakan Analisis SWOT dimana mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki dan dihadapi dalam penyusunan strategi aksesibilitas kredit UMKM dan IKM (lihat Tabel 6). Strategi yang digunakan untuk meningkatkan akses kredit UMKM dan IKM adalah

**Tabel 6. Matriks SWOT Aksesibilitas Kredit UMKM dan IKM di Kota Semarang**

<b>Internal</b>	<b>Strength - S</b>	<b>Weakness - W</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMKM dan IKM di Kota Semarang berada dalam kondisi maju dan berpotensi untuk berkembang</li> <li>• Letak Kota Semarang yang strategis dan berada di Ibu Kota Jawa Tengah</li> <li>• UMKM dan IKM tahan gangguan ekonomi</li> <li>• Karakter UMKM dan IKM yang jujur, ulet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMKM dan IKM mayoritas tidak memiliki laporan keuangan</li> <li>• UMKM dan IKM tidak memiliki SIUP, NPWP</li> <li>• Mayoritas pelaku UMKM berpendidikan rendah</li> <li>• Ketidakmampuan didalam menyediakan jaminan tambahan</li> <li>• Pelaku UMKM dan IKM tidak familiar dengan produk perbankan</li> <li>• Keterbatasan penggunaan teknologi informasi (tingkat efisiensi rendah)</li> </ul>
<b>Eksternal</b>	<b>Opportunities - O</b>	<b>Threats - T</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak lembaga keuangan yang menawarkan kredit untuk UMKM dan IKM</li> <li>• Adanya KUR dari pemerintah dan Kredit Wibawa dari Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• Pemberian kredit lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suku bunga kredit tinggi</li> <li>• Jangka waktu pinjaman relatif pendek</li> <li>• Bersaing dengan rentenir</li> <li>• Terbatasnya jenis usaha yang dapat mengakses kredit di perbankan</li> <li>• Plafon kredit yang dapat diakses oleh UMKM dan IKM kecil</li> </ul>
	<b>Strategi S - O</b>	<b>Strategi W - O</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong perkembangan UMKM dan IKM</li> <li>• Sosialisasi program KUR dan Kredit Wibawa</li> <li>• Meyakinkan ke UMKM dan IKM bahwa kredit di lembaga keuangan lebih aman karena diawasi OJK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pendampingan UMKM dan IKM dalam pembuatan laporan keuangan</li> <li>• Model jaminan tambahan perlu disikapi dengan jaminan alternatif yang berfungsi sebagai moral obligation</li> <li>• Sosialisasi dan pendampingan UMKM dan IKM untuk membuat SIUP dan NPWP</li> <li>• Pengenalan UMKM kepada sumber pembiayaan (Bank dan Non Bank)</li> </ul>
	<b>Strategi S - T</b>	<b>Strategi W - T</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Special rate</i> untuk UMKM dan IKM</li> <li>• Perbankan hendaknya mulai <i>membuka</i> jenis usaha yang dapat mengakses kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi latihan perhitungan kredit yang tepat dan sesuai berdasarkan kebutuhan pengembangan UMKM dan IKM</li> <li>• Meningkatkan minat UMKM dan IKM untuk mengembangkan usaha dengan fasilitas produk dan jasa perbankan</li> </ul>



mengkombinasikan hasil dari SWOT yaitu dengan Pelatihan dan Pendampingan UMKM dan IKM dalam pembuatan laporan keuangan, Model jaminan tambahan perlu disikapi dengan jaminan alternatif yang berfungsi sebagai moral obligation, Sosialisasi dan pendampingan UMKM dan IKM untuk membuat SIUP dan NPWP, Pengenalan UMKM kepada sumber pembiayaan (Bank dan Non Bank), Memberi pelatihan perhitungan kredit yang tepat dan sesuai berdasarkan kebutuhan pengembangan UMKM dan IKM, meningkatkan minat UMKM dan IKM untuk mengembangkan usaha dengan fasilitas produk dan jasa perbankan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

UMKM dan IKM di Kota Semarang didalam pengembangan usahanya lebih prefer/ cenderung memilih Lembaga keuangan bank untuk meminjam modal usaha bagi pengembangan usahanya. Walaupun mayoritas pelaku UMKM di Kota Semarang mengandalkan lembaga keuangan bank untuk memperoleh pinjaman modal, namun tidak sedikit juga pelaku UMKM yang merasa kesulitan saat mengakses pinjaman modal. Dari 100 pelaku UMKM yang dijadikan responden, ada sekitar 66% pelaku UMKM yang mengaku mengalami kesulitan dalam mencari pinjaman modal di lembaga keuangan.

Untuk pelaku usaha yang baru pertama kali meminjam uang ke lembaga keuangan biasanya nominal yang diberikan masih kecil, yaitu berkisar antara Rp 5.000.000- Rp10.000.000, Semakin pelaku usaha tersebut rajin dalam membayar kredit tersebut dan usahanya semakin maju maka lembaga keuangan akan semakin percaya dan akan memberikan pinjaman dengan nominal yang lebih besar dari pinjaman awal. Sedangkan bagi pengusaha-pengusaha yang sudah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan bisa meminjam lebih dari Rp 100.000.000, usaha-usaha ini jelas merupakan usaha yang sudah terbilang menengah, dan sudah berkembang pesat dari awal pendiriannya, omset usahanya juga sudah tinggi dan umur usahanya juga sudah lama, serta sudah melakukan pinjaman kredit berkali-kali ke lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan sudah percaya kepada usaha tersebut dan bersedia memberikan kredit dalam nominal yang tinggi.

Penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR) di Kota Semarang terbilang sedang hal ini apabila

dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Secara total terdapat 18.801 debitur KUR di Kota Semarang. Adapun nilai akad mencapai Rp. 621.959.783.457. Data dari OJK, jumlah dana yang disalurkan oleh Lembaga keuangan kepada UMKM di Kota Semarang dari pada tahun 2018 sebesar Rp 22.774.663.687.032, sedangkan Lembaga keuangan non bank menyalurkan Rp 104.836.360.801. Untuk kredit WIBAWA yang disalurkan oleh Bank Pasar dan Bank Jateng atas persetujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kepada pelaku usaha UMKM dan IKM adalah sebanyak 512 dengan nominal Rp 3.024.000.000 pada tahun 2018 dan untuk tahun 2019 per bulan Juni 2019 yaitu sebanyak 166 proposal cair dengan nominal yang disalurkan sebesar Rp 1.320.000.000.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor penyebab rendahnya tingkat aksesibilitas usaha kecil mikro terhadap kredit perbankan adalah tingginya tingkat suku bunga, tidak memiliki tambahan agunan, pengusaha tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit, prosedur yang dirasa cukup sulit bagi pengusaha, lemahnya manajemen keuangan, dan rendahnya kemampuan dalam pembukuan yang profesional.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan akses kredit UMKM dan IKM adalah mengkombinasikan hasil dari SWOT yaitu dengan Pelatihan dan Pendampingan UMKM dan IKM dalam pembuatan laporan keuangan, Model jaminan tambahan perlu disikapi dengan jaminan alternatif yang berfungsi sebagai moral obligation, Sosialisasi dan pendampingan UMKM dan IKM untuk membuat SIUP dan NPWP, Pengenalan UMKM kepada sumber pembiayaan (Bank dan Non Bank), Memberi pelatihan perhitungan kredit yang tepat dan sesuai berdasarkan kebutuhan pengembangan UMKM dan IKM, meningkatkan minat UMKM dan IKM untuk mengembangkan usaha dengan fasilitas produk dan jasa perbankan.

Adapun rekomendasi yang dapat diusulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Perlu adanya pendampingan kepada UMKM dan IKM didalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan kepada pelaku usaha UMKM dan IKM agar dapat mengakses kredit dari Lembaga keuangan. Bentuk pendampingan ini dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Adanya pembuatan NPWP, SIUP dan TDP massal yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang bersama instansi terkait (Direktorat

Jenderal Pajak) kepada para calon debitur UMKM dan IKM yang tidak memiliki persyaratan legalitas tersebut.

Perlu adanya sosialisasi tata cara dan persyaratan pengajuan kredit yang bekerja sama dengan Lembaga keuangan yang ditujukan kepada UMKM dan IKM yang akan mengajukan kredit ke Lembaga keuangan.

Adanya diferensiasi dan fleksibilitas persyaratan kredit usaha mikro kecil dan persyaratan kredit usaha menengah seperti tingkat bunga, jangka waktu pengembalian, fleksibilitas pembayaran.

Untuk segmen pasar mikro, produk-produk perkreditan dari Lembaga keuangan harus mampu melayani kebutuhan kredit dari para pengusaha mikro yang mempunyai karakteristik tersendiri, seperti proses kredit sederhana, mudah, cepat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan. Hal lainnya, produk kredit mikro harus mampu beradaptasi terhadap perilaku dari masyarakat mikro, serta secara demografi dan geografi bersifat lokal sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan penelitian kerjasama antara LP2M Universitas Negeri Semarang dan Bappeda Kota Semarang. Pada kesempatan ini tak lupa, peneliti mengucapkan terima kasih pada Bappeda Kota Semarang yang telah mendanai penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu didalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Bhakti, Anugrah, Tri, Sakti, dkk. (2013). *Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website [https://www.researchgate.net/publication/291072365\\_PEMBERDAYAAN\\_UMKM\\_DAN\\_LEMBAGA\\_KEUANGAN\\_SYARIAH\\_MELALUI\\_PRINSIP\\_BAGI\\_HASIL](https://www.researchgate.net/publication/291072365_PEMBERDAYAAN_UMKM_DAN_LEMBAGA_KEUANGAN_SYARIAH_MELALUI_PRINSIP_BAGI_HASIL).

Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang. *Data Jumlah UMKM Kota Semarang Tahun 2015*.

Fahmy, Obaid M. (2016). *Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website

[https://www.researchgate.net/publication/322858741\\_Pengaruh\\_Keuangan\\_Inklusif\\_Terhadap\\_Kredit\\_yang\\_Disalurkan\\_pada\\_Sektor\\_Usha\\_Mikro\\_Kecil\\_dan\\_Menengah\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/322858741_Pengaruh_Keuangan_Inklusif_Terhadap_Kredit_yang_Disalurkan_pada_Sektor_Usha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_di_Indonesia).

Gustina, Dian, Siahaan, Rendi, H. (2016). *Analisa Pemilihan Kualitas Android Jelly Bean Dengan Menggunakan Metode AHP Pendekatan MCDM*. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website <https://media.neliti.com/media/publications/231771-analisa-pemilihan-kualitas-android-jelly-468d22ab.pdf>.

Hati, Shinta, W. Fitri, Helmi, S. (2017). *Analisis Pemilihan Supplier Pupuk NPK dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website <https://media.neliti.com/media/publications/236260-analisis-pemilihan-supplier-pupuk-npk-de-ada72f13.pdf>.

Jhingan. M.L., 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kelompok Kerja Indonesia Design Power, 2008, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*, Departemen Perdagangan RI.

Kushi, Evis. 2010. *Some Problems*.

Lestari, Puji, Ety. (2010). *Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri*. Universitas Terbuka. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website <http://ilp.ut.ac.id/index.php/JOM/article/view/289/242>.

McCann, Joseph E. III; Leon-Guerrero, Anna Y; Haley, Jonathan D. Jr. 2001. *Strategic Goals and Practices of Innovative Family Business*, *Journal of Small Business Management*, 39 (1) : 50.

Nurjannah, Laela. (2017). *Peran Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta (Studi Pada Anggota PLUT-KUMKM DIY)*. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website [http://digilib.uin-suka.ac.id/24672/1/13820111\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24672/1/13820111_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

Osoimehin, K.O. 2012. *An Evaluation of the Challenges and Prospects of Micro and Small Scale Entreprises development in Nigeria*. *American International Journal of Contemporary Research* Vol. 2 No. 4; April 2012.

Poernamasari, Widya, Dhonna. *Analisis Karakteristik Usaha Terhadap Aksesibilitas Pembiayaan*.

Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Profinsi Jawa Timur. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website <http://ip.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/594>.

- Repositori Stain Kudus. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website <http://eprints.stainkudus.ac.id/841/6/6.%20BAB%20II.pdf>.
- Riyadi dan Dedy Supriady Brantakusumah, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riyanti, Benediccta Prihatin Dwi. 2003. *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, Efendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survey*, Cetakan kedua, LP3ES, Jakarta.
- Sulistyastuti, Dyah Ratih, Muhammad Prayoga dan Nisa Agistian Rachman. 2014. Gearing up for ASEAN Economic Community: SME Response and Preparedness to Regional Market Integration. *Proceedings ICONAS Conference*.
- Tinjauan Pustaka Industri Kecil dan Menengah. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website <http://digilib.unila.ac.id/3048/12/BAB%20II.pdf>.
- Tinjauan Lembaga Keuangan. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada Website. <https://anzdoc.com/bab-ii-tinjauan-pustaka-a-pengertian-lembaga-keuangan.html>
- Todaro, Michael P., 2003, *Economic Development, Eight Edition*. Pearson Education Limited, United Kingdom.
- U, Dani, Danuar, Tri. (2013). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*. Diakses pada tanggal 7 Februari. Pada website <https://media.neliti.com/media/publications/19599-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-berbasis-ekonomi-kreatif-di-kot.pdf>
- Umar, Husein. 1999. *Riset Strategi Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.